

EDISI : Kamis, 11 April 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
KABUPATEN BULELENG

Nama Media : *Bali Express*

Kategori : *IMIGRASI*

Perbekel Petandakan Tunggu Langkah Kepolisian Terhadap WNA Belanda

Berharap Yang Bersangkutan Dideportasi

SINGARAJA- Perbekel Desa Petandakan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, I Wayan Joni Arianto tengah menunggu langkah kepolisian untuk memproses laporannya ke Mapolsek Kota Singaraja yang dilakukan Senin (8/4) lalu. Pihaknya berharap Warga Negara Asing (WNA) asal Belanda, Johannes Franciscus Peters, 60 yang diduga kerap bikin onar di Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng bisa angkat kaki dari Petandakan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dikonfirmasi Bali Express Rabu (9/4) siang, Perbekel Joni mengaku masih menunggu langkah yang diambil pihak kepolisian dalam penanganan kasus ini. "Kami masih menunggu bagaimana tindak lanjut dari penegak hukum. Artinya masih ada penyelidikan, penyidikan. Sifatnya harus menunggu dulu. Kalau belum ada tindak lanjut ya kami tanyakan lagi," ujarnya.

Perbekel Joni mengaku tak ingin gegabah dalam mengambil keputusan atas kasus ini. Terlebih jika



PUTU MARDIKA/ BALI EXPRESS

MELAPOR: Perbekel Petandakan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng I Wayan Joni Arianto saat melapor ke Polsek Singaraja. Yakni melaporkan Johannes Franciscus Peters, WNA asal Belanda, karena diduga sering bikin onar.

yang dihadapi WNA yang tentunya berdampak terhadap citra Bali dan Kabupaten Buleleng sebagai destinasi wisata.

"Harapan kami agar WNA ini angkat kaki dari Petandakan. Ya memang masih ada pendekatan dengan penjaminnya. Kami juga menelusuri siapa

pemilik kontrakan yang ditempati WNA itu. Kami tak mau gegabah. Makanya harus berkordinasi dengan Imigrasi, kepolisian," ujarnya.

Di sisi lain, Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Thomas Aries Munandar, mengklaim telah mendatangi WNA ke Desa Petandakan. Selain memeriksa terlapor, pihak Imigrasi sebut Thomas juga menggali keterangan dari warga yang pernah diajak berseteru dengan terlapor.

"Sudah kami lakukan pengawasan terhadap WNA dan warga sekitar juga yang diajak berseteru. Pastinya yang bersangkutan sudah kami mintai keterangannya terkait laporan warga. Kami masih tahap pemeriksaan," ujar Thomas.

Lalu apakah terlapor memenuhi syarat ijin tinggal? Lanjut Thomas terkait ijin tinggal terlapor selama ini tidak ada masalah. Bahkan terlapor merupakan WNA yang legal. Selama ini ijin tinggal kunjungan dijamin seorang WNI bernama Wayan Nita Marlina. "Ijin tinggalnya ada. Memang ada yang menjamin dari WNI," imbuhnya.

Disinggung terkait pemicu seringnya terlapor marah-marah dan berseteru dengan warga setempat, Thomas enggan membeberkan. Sebab pihak Imigrasi masih melakukan proses

penyelidikan dan menggali keterangan. "Kalau penyebabnya dia berulah, ya belum kami bisa ungkapkan. Karena masih dalam proses penyelidikan dan menggali keterangan," kilahnya.

Kendati demikian, Thomas sempat menyarankan agar terlapor bersama penjaminnya untuk sementara waktu tidak tinggal di wilayah itu. Sehingga tidak memperkeruh suasana di Desa Petandakan. "Kami sudah menyarankan untuk sementara waktu agar yang bersangkutan tak tinggal di sana. Tapi itu bukan keputusan final. Itu masih saran pribadi," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya Perbekel Wayan Joni Arianto melaporkan Peters ke Mapolsek Kota Singaraja Senin (8/4) lalu. Lantaran kerap bikin onar dan berseteru dengan warga setempat di perumahan wilayah Dusun Kawan, Desa Petandakan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng.

Selama ini Peters tinggal bersama penjaminnya bernama Wayan Nita Marlina, 44 seorang WNI asal Jalan Pulau Menjangan Kelurahan Banyuning. Peters dikabarkan tinggal di Petandakan sejak 2 tahun silam dan mendapat Surat Keterangan Lapori Diri (SKLD) dari Perbekel dengan masa berlaku hingga 4 Maret 2020. (dik/ima)

Nama Media : *Bali Express*

Kategori : *DANAU*

Kerap Terendam, Areal Pura Ulun Danau Buyan Ditata

SUKASADA - Areal pelaba Pura Ulun Danau Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, mulai ditata. Penataan dengan cara ditimbun itu dilakukan Desa Pakraman Pancasari. Mengingat areal pelaba pura seluas 10 are sudah tergenang air danau sejak beberapa tahun terakhir. Praktis, areal itu tidak bisa digunakan sebagai tempat melasti.

Pengurukan menggunakan tanah dilakukan sejak tiga hari terakhir. Material tanah diambil dari hasil penggalian pembuatan shortcut titik lima dan enam di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada.

Bendesa Adat Pakraman Pancasari AA Ngurah Dharma Wirata mengungkapkan, sesuai sertifikat tanah drue pura (DP) Ulun Danau Buyan tercatat seluas 28 are. Dari luas itu, ada sekitar 10 are tanah pelaba pura yang berada di tepian Danau Buyan. Tanah itu kerap digunakan untuk areal melasti dan upacara yadnya di pura setempat. "Nah memang karena ada tanah gratis, sehingga kami menguruk areal yang tergenang. Selain itu pemerintah kan berencana melakukan normalisasi Danau Buyan juga," katanya saat dikonfirmasi Rabu (10/4) siang.

Setelah pemadatan, areal yang sudah datar itu selanjutnya akan dipasang beton vasing. Penataan juga menyasar wantilan yang juga posisinya lebih rendah dari lahan parkir saat ini. Termasuk galian bekas kolam yang sudah tak difungsikan akan turut ditimbun.

Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) menyambut positif upaya prajuru Desa Pakraman

Pancasari yang telah menata areal tanah pelaba pura. Pihaknya pun mengaku telah melihat pengerjaan pemadatan tanah pelaba pura itu Selasa (9/4) lalu.

Suradnyana mengatakan, bila posisi lahan lebih tinggi dari genangan danau, maka tanah pelaba pura itu dapat difungsikan. Baik untuk kepentingan Desa Pakraman, maupun mendukung program pemerintah yang rutin setiap tahun menggelar hajatan Festival Danau Buyan. "Saya sudah lihat langsung dan penimbunan itu sangat positif untuk menyelamatkan tanah pelaba pura. Karena sangat diperlukan untuk menunjang upacara di pura atau kegiatan lain," katanya.

Kedepan bila pengurukan tuntas dilakukan, Bupati

Suradnyana mengusulkan pembuatan senderan permanen. Tujuannya untuk mencegah kemungkinan tanah mengalami erosi yang memicu terjadinya pendangkalan.

Dengan ditetapkannya Danau Buyan dan Danau Tamblingan menjadi danau prioritas dua Nasional, dipastikan tanggungjawab penanganan dapat dilakukan secara komprehensif melalui kebijakan pemerintah pusat. Sehingga kelestarian Pura Ulun Danau Buyan senantiasa terjaga. "Tidak mudah mendapatkan danau prioritas dua Nasional tanpa ada pendekatan dan lobi yang baik ke pusat. Sekarang sudah ditetapkan mulai tahun 2020, penanganan komprehensif danau yang rusak ini ditangani dengan optimal," tutupnya. (dik/wid)



CEK LOKASI: Bupati Suradnyana saat meninjau pengurukan di areal pelaba Pura Danau Buyan, Selasa (9/4) lalu.

PUTU MARDIKA/ BALI EXPRESS

Nama Media : *Bali Express*

Kategori : *PAD*

Genjot PAD, Pemkab Buleleng Sewakan Tanah Eks SGO

SINGARAJA-Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah terus digenjot Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng. Langkah itu diambil untuk menambah pundi-pundi pemasukan daerah. Salah satunya dengan memanfaatkan aset eks mess Sekolah Guru Olahraga (SGO) di Jalan Sahadewa dan Jalan Simpang Udayana Singaraja untuk disewakan.

Kepastian itu terungkap saat rapat Bidang Aset BKD Buleleng, di Ruang Rapat BKD, Selasa (9/4) siang. Dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Aset BKD Made Pasda Gunawan itu, sejumlah calon penyewa mulai mendapat penjelasan.

Para penyewa ini notabene merupakan pemilik bangunan yang berdiri di atas tanah Pemkab Buleleng. Mereka mendapat

penjelasan terkait besaran sewa yang akan dikenakan berdasarkan hasil penilaian dari tim *appraisal* independen.

"Untuk lahan yang di kompleks Jalan Sahadewa sewanya 46.000 per meter persegi per tahun, kemudian untuk yang di Simpang Udayana karena lokasinya lebih strategis didapatkan hasil 50.000 per meter persegi per tahun," ungkapnya.

Pasda Gunawan menambahkan, nilai sewa itu sudah bersifat final dan tidak dapat ditawar lagi. Nilai sewa yang wajib dibayar oleh pemilik bangunan di atas lahan itu sudah berdasarkan penilaian secara objektif oleh tim yang profesional.

Dijelaskannya, lahan milik Pemkab Buleleng di dua titik lokasi tersebut berstatus hak pakai atas nama Pemkab Buleleng. Hak tersebut secara resmi diperoleh

tahun 2015, setelah pada tahun 2005 silam lahan tersebut diserahkan kepada Pemkab Buleleng.

Disinggung mengenai luas lahan yang disewakan itu, Pasda mengatakan untuk lahan yang berada di Jalan Sahadewa dan Simpang Udayana masing-masing 1.250 M2 dan 400 M2. Adapun jumlah pemilik bangunan yang menempati lahan dimaksud secara keseluruhan sebanyak 10 orang.

"Selanjutnya, jika sesuai dengan keinginan dan harapan dari sisi nilai (sewa), yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sewa dan menindaklanjuti dalam bentuk pembayaran," imbuhnya. Jika calon penyewa menyetujui harga sewa yang diajukan Pemkab Buleleng, selanjutnya yang bersangkutan akan dibuatkan naskah Perjanjian Kerja Sama terhadap pemanfaatan sewa. Jangka waktu

penyewaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasda menjelaskan lahan itu dulunya merupakan milik instansi vertikal Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali, yang dimanfaatkan untuk mess SGO. Memasuki otonomi daerah, pada tahun 2005 lahan tersebut akhirnya diserahkan kepada Pemkab Buleleng.

Tetapi, sejak saat itu lahan dimaksud tidak dimanfaatkan sama sekali oleh pihak Pemkab Buleleng. Namun hanya ditempati oleh eks pegawai SGO tanpa ada kompensasi apapun kepada Pemkab Buleleng.

"Kemudian pada tahun 2015 bertahap kami lakukan peralihan hak yang dulunya atas nama SGO menjadi hak pakai atas nama Pemda (Buleleng). Dan sudah tercatat menjadi aset Pemda sejak tahun 2015," tuturnya. **(dik/ima)**



SEWAKAN LAHAN: Rapat terkait pembahasan sewa lahan eks SGO yang dilaksanakan BKD Buleleng.